

PERAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN WISATA AIR TERJUN SEFROK KAMPUNG WENDI KABUPATEN SORONG SELATAN

Golda Fransina Krimadi¹, Karmila Sinen², Yoga Andriyan³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: krimadigolda@gmail.com

Abstrak

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kampung Wendi dalam pengembangan wisata alam Air Terjun Sefrok di Kabupaten Sorong Selatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan observasi langsung, dengan sumber data primer berasal dari Pemerintah Kampung Wendi dan masyarakat pengelola wisata, serta data sekunder dari dokumen pemerintah dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Wendi telah berperan dalam pengembangan wisata Air Terjun Sefrok melalui dukungan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pariwisata yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, seperti pembangunan gazebo, toilet umum, jembatan akses, gapura, dan lahan parkir. Namun, pengembangan wisata tersebut belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur jalan, minimnya fasilitas pendukung pariwisata, keterbatasan sumber daya manusia, serta pembatasan pengelolaan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Di sisi lain, keindahan alam dan dukungan anggaran menjadi potensi utama yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah daerah, dan masyarakat adat agar pengelolaan wisata Air Terjun Sefrok dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat setempat.

Kata kunci: Peran Pemerintah Kampung; Pengembangan Pariwisata; Pariwisata Berbasis Masyarakat; Wisata Alam; Sorong Selatan

Abstract

Community-based tourism development is a strategic effort to improve the welfare of local communities by sustainably utilising natural resource potential. This research aims to analyse the role of the Wendi Village Government in developing the Sefrok Waterfall natural tourism in South Sorong Regency, as well as to identify supporting and hindering factors in its development. This research uses a descriptive qualitative approach with a field research design. Data collection was carried out through unstructured interviews and direct observation, with primary data sources coming from the Wendi Village Government and tourism management communities, and secondary data from government documents and relevant literature. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation techniques. The research results indicate that the Wendi Village Government has played a role in the development of Sefrok Waterfall tourism through support for the provision of tourism infrastructure and facilities facilitated by the Regional Government, such as the construction of gazebos, public toilets, access bridges, gates, and parking areas. However, the development of tourism has not been optimal due to limited road infrastructure, a lack of tourism support facilities, limited human resources, and management restrictions related to the customary rights of indigenous communities. On the other hand, natural beauty and budget support are key potentials that can be further developed. This research recommends strengthening the synergy between village government, local government, and indigenous communities so that the management of Sefrok Waterfall tourism can develop sustainably and provide economic and social benefits for the local community.

Key words: The Role of the Village Government; Tourism Development; Community-Based Tourism; Nature Tourism; South Sorong

Article History:

Received : 2025-10-10

Revised : 2025-11-20

Accepted : 2025-12-31

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan aktivitas pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Pengalaman wisatawan sangat dipengaruhi oleh daya tarik suatu tempat atau lokasi yang dikunjungi. Berdasarkan sifatnya, objek wisata dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu objek wisata alam yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti air terjun dan sungai, objek wisata budaya yang berkaitan dengan unsur-unsur budaya dan peninggalan sejarah, serta objek wisata alam budaya yang telah dimodifikasi melalui kreativitas manusia agar lebih menarik, seperti taman wisata (Bakaruddin, 2009). Keberagaman bentuk objek wisata tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Definisi ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Prayogo dan Febrianita (2018) menyatakan bahwa pariwisata adalah perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan rekreasi dan hiburan. Sementara itu, Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan perjalanan sementara yang dilakukan seseorang dengan perencanaan tertentu bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menikmati kegiatan rekreasi dan memenuhi kebutuhan hiburan.

Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata alam yang cukup besar. Salah satu objek wisata alam yang potensial adalah Air Terjun Sefrok yang terletak di Kampung Wendi, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Air Terjun Sefrok berada di kawasan hutan adat dan namanya berasal dari bahasa daerah setempat, yaitu "Sefrok" yang berarti air terpencar, sehingga Air Terjun Sefrok dimaknai sebagai air terjun yang aliran airnya menyebar. Keunikan nama dan karakteristik alam tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata alam di wilayah ini.

Secara geografis, Air Terjun Sefrok dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dalam waktu kurang lebih satu jam dari ibu kota Kabupaten Sorong Selatan, Teminabuan, dan sekitar tiga jam perjalanan dari Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Setelah mencapai titik parkir, pengunjung harus melanjutkan perjalanan sekitar dua kilometer melalui jalan setapak selama kurang lebih satu setengah jam. Jalur menuju lokasi wisata masih berupa jalan setapak yang rimbun dengan pepohonan tropis, melewati sungai dengan jembatan titian kayu dari pohon tumbang, serta medan yang licin terutama pada musim hujan. Air Terjun Sefrok memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan air yang jernih dan dikelilingi oleh perbukitan serta pepohonan besar yang menciptakan suasana sejuk dan alami.

Meskipun memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan, pengelolaan wisata Air Terjun Sefrok masih menghadapi berbagai permasalahan. Sarana dan prasarana pendukung seperti penginapan, tempat peristirahatan yang memadai, serta warung makan bagi pengunjung belum tersedia. Kondisi ini menyebabkan wisatawan kesulitan untuk menikmati objek wisata dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, meskipun telah diberlakukan tarif masuk dan parkir bagi pengunjung, tingkat kunjungan wisatawan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi dan pemasaran wisata serta minimnya perhatian pemerintah kampung dalam memperkenalkan potensi wisata Air Terjun Sefrok kepada masyarakat luas.

Pengembangan wisata Air Terjun Sefrok sesungguhnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan kampung dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Pemerintah Kampung dalam mengembangkan objek wisata ini melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan fasilitas pelayanan wisata, serta promosi yang berkelanjutan. Fasilitas yang dimaksud meliputi tempat peristirahatan, penyediaan air bersih, warung kecil untuk kebutuhan wisatawan, serta akomodasi pendukung lainnya. Namun, pada kenyataannya fasilitas-fasilitas tersebut masih sangat terbatas dan jauh dari harapan.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pengembangan pariwisata berbasis lokal. Partisipasi masyarakat merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pelestarian lingkungan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Raharjana (2012) juga menegaskan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mengendalikan arah pengembangan pariwisata agar dampak negatif aktivitas wisata dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pengembangan wisata Air Terjun Sefrok memerlukan sinergi antara Pemerintah Kampung dan masyarakat lokal agar potensi wisata yang dimiliki dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat Kampung Wendi.

LITERATURE REVIEW

Upaya Pemerintah Kampung dalam Pengembangan Pariwisata

Upaya pemerintah kampung merupakan rangkaian tindakan strategis yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta menjaga dinamika pembangunan lokal. Menurut Ryaas Rasyid (2010), pemerintah kampung memiliki peran penting sebagai dinamisator pembangunan, yakni menggerakkan, mendorong, dan memelihara partisipasi masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pemerintah kampung menjalankan perannya melalui pemberian bimbingan, pengarahan, dan pelatihan kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan sumber daya alam, serta mempertahankan keaslian daya tarik wisata. Sementara itu, pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, khususnya dalam pengembangan produk lokal seperti souvenir dan oleh-oleh khas yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.

Konsep upaya tidak dapat dipisahkan dari konsep peran (role). Soekanto (2004) menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang terwujud ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial. Peran pemerintah kampung, dalam hal ini, mencerminkan seperangkat norma, perilaku, dan tindakan yang membimbing penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan potensi lokal, termasuk sektor pariwisata.

Upaya pemerintah juga dipahami sebagai bentuk usaha, akal, dan ikhtiar untuk mencapai tujuan tertentu serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat (Poerwadarminta, 2006; Surayin, 2001). Upaya tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu upaya preventif, preservatif, kuratif, dan adaptif. Keempat bentuk upaya ini saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan pariwisata, mulai dari pencegahan kerusakan lingkungan, pemeliharaan kondisi yang kondusif, pemulihan permasalahan sosial, hingga penyesuaian masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan pembangunan.

Peran Pemerintah Kampung sebagai Fasilitator dan Regulator

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah kampung berperan sebagai fasilitator dan regulator. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dengan menjembatani kepentingan berbagai pihak, khususnya masyarakat lokal. Peran fasilitasi diwujudkan melalui pendampingan, pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta dukungan permodalan guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Ryaas Rasyid, 2010).

Sebagai regulator, pemerintah kampung berfungsi menetapkan arah pembangunan melalui penyusunan dan penerapan peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan pariwisata. Regulasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pembangunan pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pengembangan Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata merupakan strategi untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata agar mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta pemerintah daerah (Paturusi, 2001; Yoeti, 2001). Pengembangan pariwisata membutuhkan perencanaan yang matang agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Santi, 2010).

Suwarti dan Yuliamir (2017) menekankan bahwa pengembangan pariwisata melibatkan tiga unsur utama, yaitu manusia sebagai pelaku utama, tempat sebagai ruang aktivitas pariwisata, dan waktu sebagai durasi kunjungan wisatawan. Ketiga unsur ini harus dikelola secara terpadu agar pengembangan destinasi wisata berjalan optimal.

Dalam perspektif keberlanjutan, Weaver (2012) dan Sugiyama (2011) menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Sejalan dengan itu, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan harus memperhitungkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh serta melibatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama.

Pariwisata, Potensi Lokal, dan Partisipasi Masyarakat

Pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan sementara yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperoleh kenikmatan, pengetahuan, dan pengalaman, tanpa tujuan mencari upah (Suwantoro, 2004; Gamal, 2004). Potensi pariwisata meliputi sumber daya alam, budaya, dan buatan yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata (Damanik & Weber, 2006).

Pengembangan pariwisata sangat bergantung pada partisipasi masyarakat lokal. Pitana dan Gayatri (2005) menyatakan bahwa pariwisata memiliki daya dorong yang kuat terhadap perubahan sosial masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata menjadi kunci keberhasilan pembangunan destinasi wisata berbasis komunitas.

Digitalisasi Pariwisata dan Peran Pemerintah Lokal

Perkembangan pariwisata di era digital menuntut dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan teknologi informasi. Media digital dan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok berperan penting dalam promosi dan pemasaran destinasi wisata secara efektif dan efisien (Sudarmawan & Prasetia, 2019). Digitalisasi pariwisata memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi, melakukan pemesanan, serta mengenal daya tarik wisata secara luas (Kharisma, 2023).

Dalam konteks ini, pemerintah kampung memiliki peran strategis dalam mendorong digitalisasi wisata melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan kebijakan pendukung. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana juga ditekankan oleh World Bank dalam berbagai kajian pembangunan pariwisata berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menekankan pada proses penelusuran data hingga diperoleh pemahaman yang utuh untuk melakukan interpretasi terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2001), penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan untuk menjelaskan fenomena sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap realitas empiris terkait manajemen konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat pada objek wisata Air Terjun Sefrok di Kampung Wendi.

Desain penelitian disusun sebagai pedoman yang sistematis dan terstruktur dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Desain ini berfungsi untuk memberikan arah yang jelas agar penelitian berjalan secara terencana dan terkendali. Mengacu pada pendapat Fachruddin (2009), desain penelitian mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data guna memperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan Mei 2025, dengan lokasi penelitian di Kampung Wendi, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa objek wisata alam Air Terjun Sefrok memiliki potensi strategis dan daya tarik alam yang tinggi, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks pengelolaan pariwisata dan peran Pemerintah Kampung dalam mengelola serta mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Pemerintah Kampung Wendi dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata Air Terjun Sefrok. Informan diposisikan tidak hanya sebagai responden, tetapi juga sebagai pemilik informasi yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terkait pengelolaan wisata. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan, arsip, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendukung dan melengkapi data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengelolaan objek wisata Air Terjun Sefrok. Wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan. Informan yang diwawancara meliputi Kepala Kampung Wendi dan masyarakat Kampung Wendi yang berperan sebagai pengelola destinasi wisata. Selain itu, observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati kondisi dan aktivitas pengelolaan wisata yang meliputi pengembangan infrastruktur, produk wisata, sistem pengelolaan, daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas, partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat setempat.

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan hubungan antar kategori agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh hingga dihasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Wendi memiliki peran penting dalam pengembangan wisata alam Air Terjun Sefrok di Kabupaten Sorong Selatan, terutama melalui dukungan penyediaan infrastruktur serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Pengembangan pariwisata di kawasan ini tidak terlepas dari keterlibatan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Sorong Selatan, yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan infrastruktur. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perhatian dan dukungan yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar pengembangan wisata Air Terjun Sefrok dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam aspek penyediaan infrastruktur, Pemerintah Daerah telah berkontribusi dalam membangun sejumlah fasilitas dasar yang mendukung aktivitas pariwisata. Infrastruktur menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai penopang utama kelancaran mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan. Bantuan infrastruktur yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan (KPHP) Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan wisata alam di Kampung Wendi. Namun, berdasarkan temuan lapangan, pembangunan infrastruktur tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengembangan wisata secara menyeluruh, sehingga memerlukan perhatian dan perencanaan lanjutan dari Pemerintah Kampung bersama pemerintah daerah terkait.

Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di wisata Air Terjun Sefrok telah dilakukan melalui penyediaan fasilitas umum yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan

wisatawan. Sarana dan prasarana memiliki peran strategis karena secara langsung memengaruhi minat kunjungan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan pengelola dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana wisata melalui pembangunan gazebo, gapura, tempat parkir, toilet umum, serta jembatan akses di kawasan wisata Kampung Wendi, Distrik Sawiat.

Fasilitas umum yang tersedia di wisata Air Terjun Sefrok antara lain tujuh unit gazebo, satu toilet umum, satu gapura, jembatan akses, serta lahan parkir kendaraan. Enam unit gazebo, satu gapura, satu toilet umum, satu lahan parkir, dan jembatan kayu sepanjang kurang lebih 800 meter dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2018. Sementara itu, satu unit gazebo dan satu jembatan penyeberangan dibangun oleh Dinas Kehutanan melalui KPHP Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2019. Keberadaan gazebo menjadi sarana penting bagi wisatawan untuk beristirahat, makan, dan berfoto, sehingga mendorong wisatawan untuk menikmati objek wisata dalam waktu yang lebih lama. Dari hasil observasi, jumlah gazebo yang tersedia dinilai cukup memadai, namun pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan.

Fasilitas toilet umum yang tersedia di kawasan wisata Air Terjun Sefrok terdiri dari satu bangunan dengan tiga pintu, yang dibangun pada tahun 2018. Keberadaan toilet merupakan fasilitas dasar yang sangat penting dalam mendukung kenyamanan wisatawan. Namun, keterbatasan jumlah dan kondisi fasilitas toilet masih menjadi catatan penting dalam pengembangan wisata ini. Selain itu, jembatan akses yang dibangun di Sungai Alawet berfungsi sebagai penghubung antara area wisata dan mempermudah wisatawan dalam melakukan aktivitas di sekitar kawasan Air Terjun Sefrok. Gapura yang tersedia berfungsi sebagai pintu masuk kawasan wisata dan menjadi identitas awal destinasi wisata Air Terjun Sefrok bagi pengunjung.

Lahan parkir yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2018 dinilai cukup memadai untuk menampung kendaraan wisatawan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun demikian, akses jalan menuju kawasan wisata masih menjadi permasalahan utama. Infrastruktur jalan menuju Air Terjun Sefrok sebagian besar masih berupa jalan setapak yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat pengelola. Kondisi jalan menjadi semakin sulit dilalui pada saat musim hujan karena medan yang cukup ekstrem, sehingga berpotensi mengurangi minat kunjungan wisatawan.

Selain peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan wisata Air Terjun Sefrok. Faktor pendukung utama adalah keindahan alam yang dimiliki Air Terjun Sefrok. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan kolam alami yang luas, dikelilingi oleh hutan yang masih asri dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Suasana alam yang sejuk, suara gemuruh air terjun, serta keberadaan flora dan fauna endemik seperti burung maleo dan burung cendrawasih menjadi daya tarik tersendiri yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata alam unggulan di Kabupaten Sorong Selatan.

Faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan anggaran dalam pengembangan wisata. Anggaran menjadi faktor penting dalam mendukung kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan promosi wisata Air Terjun Sefrok. Alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan wisata menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Kampung Wendi.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat dalam pengembangan wisata Air Terjun Sefrok. Keterbatasan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung pariwisata masih menjadi kendala utama. Fasilitas seperti penginapan, warung makan, dan sarana pendukung lainnya belum tersedia, sehingga menyulitkan wisatawan yang ingin berkunjung dalam waktu yang lebih lama. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kenyamanan dan minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke kawasan wisata Air Terjun Sefrok.

Faktor penghambat lainnya adalah hak ulayat kepemilikan masyarakat adat. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat adat atas wilayah tertentu, termasuk

kawasan wisata Air Terjun Sefrok. Dalam praktiknya, pengembangan pariwisata masih dibatasi oleh kepemilikan ulayat karena masyarakat adat berupaya mempertahankan wilayahnya. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan partisipatif dan dialog yang intensif antara pemerintah kampung, pemerintah daerah, dan masyarakat adat agar pengembangan wisata dapat berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan dalam pengelolaan wisata Air Terjun Sefrok. Pengembangan pariwisata memerlukan SDM yang memiliki kapasitas dan keterampilan dalam mengelola destinasi wisata secara profesional. Kurangnya SDM yang terlatih menyebabkan pengelolaan wisata belum berjalan secara optimal dan belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara keseluruhan, pengembangan wisata Air Terjun Sefrok sangat bergantung pada sinergi antara potensi alam, dukungan infrastruktur dan fasilitas, peran aktif Pemerintah Kampung, serta partisipasi masyarakat. Upaya penguatan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendukung, pengelolaan hak ulayat secara partisipatif, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar wisata Air Terjun Sefrok dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat Kampung Wendi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kampung Wendi memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan wisata alam Air Terjun Sefrok di Kabupaten Sorong Selatan, khususnya melalui dukungan penyediaan infrastruktur serta pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan (KPHP). Berbagai fasilitas seperti gazebo, toilet umum, jembatan akses, gapura, dan lahan parkir telah tersedia dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kenyamanan wisatawan. Namun demikian, pengembangan wisata Air Terjun Sefrok belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur jalan, minimnya fasilitas pendukung pariwisata, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya pembatasan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Meskipun demikian, keindahan alam yang dimiliki Air Terjun Sefrok dan dukungan anggaran menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Wendi serta mendukung pembangunan pariwisata daerah secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kampung Wendi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam perencanaan serta pengembangan wisata Air Terjun Sefrok, terutama dalam peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar serta fasilitas pendukung pariwisata. Pemerintah kampung diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat adat melalui pendekatan dialog dan musyawarah untuk mengelola hak ulayat secara partisipatif tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan di bidang pengelolaan pariwisata agar masyarakat mampu mengelola potensi wisata secara profesional. Dengan perencanaan yang terarah, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta penguatan peran masyarakat, wisata Air Terjun Sefrok diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi masyarakat Kampung Wendi dan Kabupaten Sorong Selatan secara keseluruhan.

Reference

- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 1-18.

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiministrasi Publik*, 5(2), 443-449.
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Athirah, A. M., Hidayat, R., Henraman, H., & Sakti, D. A. B. (2024). Peningkatan Pengetahuan tentang E-Government dalam Pengembangan Desa Berbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3(4), 447-455.
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Likewati, W. O., Athirah, A. M., Hidayat, R., ... & Sakti, D. A. B. (2024). The implementation of e-government for village good governance in South Misool, Raja Ampat. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(3), 531-539.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24-35.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Produksi Tanaman Pangan Padi dan beras Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Badan Pusat Statistik. <https://jatim.bps.go.id/> [28 Juni 2023]
- Badudu & Zain. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Pusat Statistik DIY. (2023). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka.
- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler. (2017), Metode Penelitian Bisnis, Edisi 11, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. (2006). Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta : PUSBAR UGM & ANDI YOGYAKARTA
- Darmatasia. (2020). Deteksi Penggunaan Masker Menggunakan Xception Transfer Learning. *Jurnal INSTEK (Informatika Sains dan Teknologi)*.
- Departemen Pendidikan Nasional . 2008 . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar akademik dan Kompetensi Konselor.
- Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2023). Tax Revenue Strategy: Telaah Pelayanan Pajak. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiministrasi Publik*, 3(2), 108-116.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 34-45.
- Difinubun, Y., & Sismar, A. (2025). Corporate Social Responsibility as a Moderator of Good Corporate Governance with Company Performance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 35-51.
- Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fachruddin, Imam. (2009). Desain penelitian. Malang: Universitas Islam Negeri Gde, P., Pitana, P., & Gayatri, G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Andi: Yogyakarta.
- Henraman, H. (2021). Perencanaan Dan Stategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Kab. Nunukan (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnui, S. (2025). Contextualizing religious moderation through intercultural communication: A case study of the Muslim Papuan community in Sorong, Indonesia. *KURIOSITAS*, 1-12.
- Irwan, A., Mahfudhurnajamuddin, M., Nujum, S., & Mangkona, S. (2020). The effect of leadership style, work motivation and organizational culture on employee performance mediated by job satisfaction. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 642-657.
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Gaung Persada (GP Press)
- James, Spillane, J. (1982; 20). Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Kanisius
- Jaenudin, Muh. Taufiq. 2019. "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui

- Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 12. No. 2.
- Jaminah, J., Mau, M., Judhariksawan, J., Ode, C. A. A., & Nursyamsi, N. (2022). Profesionalisme Wartawan Politik Pada Media Online Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 33-40.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2012. Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia. ILO Country Office: Jakarta.
- Kementerian Pariwisata. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam pasal 1
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2023
- Kharisma, (2023). Strategi Pengembangan Digitalisasi Desa Wisata : Studi Kasus Desa Jatiluwuh, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.
- Komaruddin, 1994, Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2, Jakarta: Bina Aksara.
- Kodhyat, H. (1983). Pengertian Pariwisata dan Kepariwisataan. Yogyakarta
- Kharisma, L. P. I. K, Sitti Rachmawati Y., Sepriano, R. T. Handayanto, Herlawati, I Made A. O. G., I Putu S. H., Heliza, R. H. dan A. Syamil. (2023). Metode SPK Favorit di Masa Depan. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2005). Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan
- Luh Putu Mahyuni, & Dewa Made Agus Satriawan. (2021). Menggali Potensi Maniktawang Sebagai Desa Wisata Alam dan Budaya. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1088-1096. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.6300>
- Mistriani, N., & Pratamaningtyas, O. W. 2019. Strategi Pengembangan Daya Tarik Melalui Penawaran dan Permintaan Dalam Pariwisata Di Grand Maerakaca 134 Jawa Tengah. *Journal of Chemical Information and* <http://stiepari.greenfrogts.co.id/jurnal/index.php/JT/article/view/160/162>.
- Muhamad, S., & Supardi, E. (2025). Soliditas Koalisi Partai Politik Di Aras Lokal Pilpres 2024. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiministrasi Publik*, 5(2), 434-442.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153-165.
- Munzir, M. (2023). Tingkat Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Pemahaman Sak Emkm (Studi Umkm Pada Kabupaten Sorong). Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 10.
- Munzir, M., Jumroh, L. A., Rachmadana, S. L., Kusmiadi, M. E., Rahmawati, T., Palamba, A. S., ... & Way, A. (2025, September). Level of Understanding and Implementation of PSAK 112 from The Waqf Accounting Perspective. In IECON: International Economics and Business Conference (Vol. 3, No. 1, pp. 72-78).
- Ode, C. A. A., Juminah, J., Syamsi, N., & Rima, R. (2022). Analisis Pengelolaan Batasan Privasi di Jejaring Sosial Media (Studi Naratif Gay di Media Sosial Facebook). *Jurnal Ilmiah Psikomuda (JIPM) Connectedness*, 2(2), 85-95.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1-20.
- Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiministrasi Publik*, 5(1), 270-277.
- Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance: Compensation, Work Motivation, Work Environment. *Financ. Account. Indonesia. Res*, 2(2), 83-96.
- Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis Kebijakan: Pengembangan

Usaha Sektor Perikanan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba, 2(1), 10-22.